

KOMUNIKASI POLITIK ANTARA BUPATI DAN DPRD DALAM PENYUSUNAN RAPBD DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dea Septiana

NPP. 29.1062

Asdaf Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : deaseptiana1@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem/Background (GAP) : The implementation of political communication that occurs in Indonesia is always accompanied by efforts by one or various parties to obtain or distribute the power they have, including during the process of preparing the draft regional revenue and expenditure budget (RAPBD). The writing of this thesis is based on the law and the opinions of experts related to Political Communication between the Regent and DPRD in the Preparation of the RAPBD. **Objective :** to find out and examine political communication between the Regent and DPRD in the preparation of the RAPBD in Kapuas Regency, Central Kalimantan Province, what are the inhibiting factors, and the efforts made to overcome these obstacles. **Method :** descriptive method with inductive approach. In collecting data using interview techniques, observation and documentation. Meanwhile, in analyzing the data using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions and data verification. **Results/Findings:** It is recommended that the legislature and executive follow each stage and schedule of preparation and routinely conduct meetings outside of the established schedule. **Conclusion:** The implementation of political communication in the preparation of the RAPBD is still not optimal due to the lack of skills and approaches in conducting political lobbying.

Keyword : RAPBD, Communication, Politics

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pelaksanaan komunikasi politik yang terjadi di Indonesia selalu disertai dengan usaha oleh satu atau berbagai pihak untuk memperoleh atau mendistribusikan kekuasaan yang dimiliki, termasuk saat proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Penulisan skripsi ini berlandaskan pada Undang-Undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan Komunikasi Politik Antara Bupati dan DPRD dalam Penyusunan RAPBD. **Tujuan :** untuk mengetahui dan meneliti komunikasi politik antara Bupati dan DPRD dalam penyusunan RAPBD di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, apa saja faktor-faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode :** metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan datamenggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan

dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. **Hasil/Temuan** : Disarankan legislatif maupun eksekutif mengikuti setiap tahapan dan jadwal penyusunan serta rutin melakukan pertemuan diluar jadwal yang ditetapkan. **Kesimpulan** : Pelaksanaan komunikasi politik dalam penyusunan RAPBD masih belum optimal dikarenakan kurangnya keterampilan dan pendekatan dalam melakukan lobi politik.

Kata Kunci : RAPBD, Komunikasi, Politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara tidak langsung menjadi dasar terbentuknya dinamika politik lokal yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan koordinasi dan penyelenggaraan di daerah masing-masing. Salah satu bentuk dinamika politik lokal tersebut adalah interaksi antara Pemerintah Daerah dan DPRD berupa komunikasi politik. Interaksi antara kedua lembaga tersebut menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah, meskipun tetap perlu adanya koordinasi dengan pusat. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selama proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut tentunya terdapat komunikasi politik yang terjadi, hal tersebut karena komunikasi politik merupakan 2 bagian dari sistem politik. Dalam pelaksanaan komunikasi politik di Indonesia sendiri selalu disertai dengan usaha oleh satu atau berbagai pihak untuk memperoleh atau mendistribusikan kekuasaan yang dimiliki, termasuk saat proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Dalam penyusunan RAPBD perlu diperhatikan bahwa setiap tahapan yang ada harus dilalui sesuai proses yang semestinya, hal tersebut untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari. proses penyusunan APBD di Kabupaten Kapuas melibatkan dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah daerah dan DPRD. Keterlibatan kedua lembaga tersebut merupakan salah satu contoh gambaran komunikasi politik yang terjadi di Kabupaten Kapuas . Keterkaitan antara kepala daerah dan DPRD dalam hal penyusunan RAPBD Kabupaten Kapuas berkenaan pula dengan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran visi dan misi dari Bupati untuk kemudian dapat disinergikan, diharmonisasikan, dan disinkronkan. Untuk menyamakan dua ide kepentingan diperlukan seni komunikasi politik untuk mencapai kesepakatan bersama saat pembahasan KUA PPAS dan RAPBD, sebagaimana jadwal yang disepakati. Komunikasi politik yang terjalin secara umum seringkali berupa lobi politik yang merupakan sebuah agenda komunikasi politik antar kelompok maupun individu yang memiliki tujuan saling mempengaruhi untuk membuat kesepakatan yang saling menguntungkan dan membangun koalisi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam proses perancangan dan penetapan APBD, DPRD berfungsi sebagai lembaga yang menyetujui RAPBD yang kemudian akan disahkan menjadi APBD. Dalam proses tersebut permasalahan yang sering kali muncul adalah banyaknya pendekatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bersangkutan kepada DPRD agar usulannya diloloskan. Hal 4 tersebut menyebabkan pengambilan keputusan oleh DPRD didasarkan pada kepentingan pribadi dan

golongan, yang mengakibatkan rusaknya sistem dan mekanisme yang seharusnya ditaati. Selain itu permasalahan lain yang sering kali terjadi adalah keterlambatan penetapan atau pengesahan, yang berdampak pada program atau proyek yang seharusnya dapat mulai dikerjakan juga terhambat. Seperti yang terjadi pada APBD Perubahan Kabupaten Kapuas tahun 2018 yang mengalami keterlambatan dikarenakan tidak adanya persamaan persepsi antara kepentingan DPRD dan Bupati sehingga melewati batas waktu penetapan APBD Perubahan sehingga tidak ada persetujuan dari provinsi untuk disahkan, dan pembahasan KUA-PPAS tahun 2020 yang sempat terjadi deadlock sebelum akhirnya dilakukan revisi jadwal oleh DPRD Kabupaten Kapuas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penggunaan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya merupakan salah satu cara agar peneliti dapat membandingkan dan menambah pengetahuan terkait penelitian yang akan dilakukan serta untuk menjadi referensi bagi peneliti. Penelitian pertama oleh Vicky Andrian Dwi Prabowo (2017) dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berjudul “Komunikasi Politik Antara Pemerintah Daerah (Pemda) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Rokan Hulu Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan”, dengan fokus penelitian fenomena hubungan komunikasi politik Pemda dan DPRD dalam penyusunan RAPBD-P. Jurnal kedua yaitu jurnal penelitian oleh Sukron Mazid dan Kuswan Hadji (2019) yang dilakukan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang berjudul “Model Komunikasi Politik Anggota Dprd dalam Upaya Penguasaan Civic Skills Masyarakat”, dengan fokus penelitian adalah model komunikasi politik dan tahapan dari komunikasi politik yang digunakan oleh anggota DPRD dalam upaya penguasaan civic skills masyarakat. Jurnal penelitian ketiga oleh Fhisilmi Kaffah, dkk (2017) dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang berjudul “Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penetapan APBD Tahun 2017” dengan fokus penelitian mengkaji bentuk interaksi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam perumusan APBD serta faktor penghambatnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokus dimana penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu perbedaan juga terletak pada teori yang digunakan oleh penulis. Ketiga peneliti sebelumnya menggunakan metode yudiris normatif dan kualitatif deskriptif sedangkan penulis juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori oleh Arifin mengenai komunikasi politik dan bentuk-bentuk dari komunikasi politik, penulis akan mencoba lebih mendetail pada bentuk komunikasi politik yang terjadi antara Bupati dan DPRD.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan komunikasi politik antara Bupati dan DPRD dalam penyusunan RAPBD di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, untuk merumuskan faktor-faktor penghambat komunikasi politik dalam penyusunan RAPBD di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk merumuskan upaya yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD untuk mengatasi hambatan komunikasi politik dalam penyusunan RAPBD di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Untuk mendapatkan hasil yang baik peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 14 informan. Antara lain Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Kepala Dinas BPKD, Kepala BAPPEDA, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Risalah Setwan, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan evaluasi BAPPEDA, Kepala Bidang Penganggaran BPKD, Anggota badan anggaran DPRD, dan 3 orang masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Komunikasi politik antara Bupati dan DPRD dalam penyusunan RAPBD di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan merujuk pada teori yang digunakan oleh penulis sebelumnya, maka penulis berusaha untuk membandingkan antara hasil analisis dengan informasi serta keadaan yang ada di lapangan. Teori komunikasi politik yang dikemukakan oleh Arifin (2003) menjelaskan dimana pada hakikatnya komunikasi politik merupakan sebuah pembicaraan dengan tujuan saling mempengaruhi dalam lingkup kehidupan bernegara, adapun bentuk-bentuk komunikasi politik adalah retorika politik, agitasi politik, propaganda, lobi politik, public relations (PR) politics, kampanye politik, serta media massa.

3.1.1. Retorika Politik

retorika politik yang merupakan bentuk komunikasi politik dengan cara berpidato/berkampanye digunakan dalam proses komunikasi politik dan terdapat dalam penyusunan RAPBD. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Kapuas tahun 2021 dan pokir DPRD. Komunikasi mengarah kepada upaya untuk merundingkan suatu permasalahan dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan atau kesepakatan.

3.1.2. Agitasi Politik

Agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan, terutama gerakan politik. Agitasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. bentuk komunikasi politik berupa agitasi politik yang merupakan hasutan untuk melakukan gerakan politik tidak termasuk dalam komunikasi politik dalam proses penyusunan RAPBD.

3.1.3. Propaganda Politik

Propaganda adalah jalan menuju partisipasi instan dalam konflik politik yang melibatkan diri sendiri. Ironisnya, propaganda juga menjadi alat untuk memutuskan hubungan dengan teman atau kerabat yang pendapatnya berbeda secara instan. bentuk komunikasi politik berupa propaganda tidak termasuk dalam komunikasi politik dalam proses penyusunan RAPBD.

3.1.4. Public Relations (PR) Politics

Public Relations termasuk ke dalam bentuk komunikasi politik yang terjadi dalam proses penyusunan RAPBD, yang juga sebagai upaya membangun komunikasi dengan publik internal

dan publik eksternal organisasi dalam suatu lingkungan politik dengan melibatkan komponen-komponen dan sumber daya politik yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk memperoleh kesepahaman dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan tujuan politik organisasi.

3.1.5. Kampanye Politik

kampanye politik lebih merujuk kepada pemilu. Untuk komunikasi politik pada proses penyusunan RAPBD sendiri tidak terdapat bentuk komunikasi politik berupa kampanye politik, dimana lebih mengarah kepada membangun komunikasi dengan antar pihak.

3.1.6. Lobi Politik

Hasil atau tujuan dari komunikasi politik berupa lobi politik adalah suatu kesepakatan atau kesepahaman yang kemudian diperkuat dengan pertemuan formal berupa rapat atau sidang politik. diketahui bahwa sering terdapat perbedaan pandangan dalam komunikasi politik pada penyusunan RAPBD dimana Bupati dan DPRD sama – sama memiliki program unggulan masing-masing, sehingga perlu adanya perundingan untuk mengkomunikasikan apa saja yang perlu dimasukkan kedalam program prioritas berupa lobi politik.

3.1.7. Lewat Media Massa

Media massa digunakan sebagai alat penyalur informasi kepada publik juga untuk alat komunikasi kepada masyarakat dengan merubah opini publik, mempengaruhi maupun memberikan citra politik yang baik, serta menjangkau masyarakat yang tidak dapat dilakukan dengan bentuk komunikasi politik lainnya. Proses penyusunan RAPBD harus bersifat terbuka kepada publik, oleh sebab itu dalam setiap tahapannya perlu adanya komunikasi pada publik melalui media massa.

3.2. Faktor Penghambat Komunikasi Politik dalam Penyusunan RAPBD di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Bupati dan tim kurang intensif dalam melakukan lobi kepada DPRD Kabupaten Kapuas dan juga sebaliknya. Hubungan eksekutif dan legislatif dari berbagai sisi berdampak besar dalam penyusunan RAPBD. DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sejajar, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terjalin komunikasi yang baik dari dua arah agar berlangsung dengan baik, dimana DPRD dan pemerintah daerahlah yang bertugas untuk membahas RAPBD bersama-sama, dalam pembahasan rancangan tersebut tentunya terdapat perbedaan pendapat dan saling mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan, menyikapi hal tersebut pemda dan DPRD harus dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik demi kepentingan bersama. Selain itu Kurangnya keterampilan Bupati maupun DPRD dalam melakukan public relation. Public relation menjadi hal penting dalam suatu komunikasi politik karena merupakan proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini memiliki tujuan untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan baik, pengertian dan kepercayaan untuk saling sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap pemerintah. Kemudian pendekatan kepada media massa kurang berjalan dengan baik. Fungsi media massa adalah penyalur pesan/berita kepada masyarakat, pandangan yang baik dari masyarakat tentunya akan memperlancar proses komunikasi politik itu sendiri. Hal ini juga mencakup aspek transparansi publik, dimana media

massa berperan sebagai alat komunikasi kepada masyarakat dengan merubah opini publik, mempengaruhi maupun memberikan citra politik yang baik, serta menjangkau masyarakat yang tidak dapat dilakukan dengan bentuk komunikasi politik lainnya.

3.3. Upaya yang Dilakukan Bupati dan DPRD untuk Mengatasi Hambatan komunikasi politik yang Terjadi dalam Penyusunan RAPBD di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Berusaha menyamakan persepsi antara Bupati dan tim dengan DPRD Kabupaten Kapuas dengan mengutamakan kepentingan bersama. Perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan DPRD tentang wewenang masing-masing ketika membahas rancangan APBD dapat menjadi hambatan dalam proses komunikasi politik yang berlangsung. Oleh karena itu perlu dilakukan komunikasi yang positif mengenai tugas dan wewenang yang ada. Kemudian mencoba memahami prosedur dan tahapan dengan menjalankan fungsi sesuai tupoksi masing-masing. Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah. Dengan menjalankan fungsi legislatif daerah yang benar dan sesuai fungsinya maka akan membantu proses komunikasi politik dalam pembahasan RAPBD nantinya. Serta Menerapkan transparansi publik karena pada dasarnya penerapan prinsip transparansi publik sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas.

3.4. Diskusi Utama Temuan Penelitian

Penelitian pertama oleh Vicky Andrian Dwi Prabowo dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berjudul “Komunikasi Politik Antara Pemerintah Daerah (Pemda) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Rokan Hulu Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan”, dengan fokus penelitian fenomena hubungan komunikasi politik Pemda dan DPRD dalam penyusunan RAPBD-P. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fenomena permasalahan yang terjadi di Rokan Hulu yaitu tidak dibahasnya Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam penelitian ini komunikasi politik gagal terlaksana karena pesan politik yang tidak dapat diinterpretasikan dengan baik sehingga menyebabkan RAPBD yang telah melewati batas waktu yang ditetapkan tidak kunjung dibahas. Pada penelitian ini lebih berfokus pada masalah yang terjadi karena adanya deadlock akibat perbedaan pendapat. Penelitian kedua oleh Sukron Mazid dan Kuswan Hadji yang dilakukan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang berjudul “Model Komunikasi Politik Anggota Dprd dalam Upaya Penguasaan Civic Skills Masyarakat”, dengan fokus penelitian adalah model komunikasi politik dan tahapan dari komunikasi politik yang digunakan oleh anggota DPRD dalam upaya penguasaan civic skills masyarakat. Fenomena masalah dalam jurnal penelitian ini adalah adanya kesesenjangan hubungan antara masyarakat dan pejabat legislatif yang didasarkan pada hasil survey Cirus Surveyors Group. Pada penelitian ini Pada penelitian ini lebih berfokus kepada hubungan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif dengan mencari tahu bentuk komunikasi politik tersebut. penelitian ketiga oleh Fhisilmi Kaffah, dkk dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang berjudul “Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penetapan APBD Tahun 2017” dengan fokus penelitian mengkaji bentuk interaksi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam perumusan APBD serta faktor penghambatnya. Fenomena masalahnya adalah keterlambatan penetapan dan pengesahan APBD 2017 yang menjadi indikasi adanya hubungan yang kurang baik antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Singingi. Penelitian ini mengkaji

lobi politik yang dirasa masih belum optimal sehingga menghambat komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis beserta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi politik antara Bupati dan DPRD dalam penyusunan RAPBD di Kabupaten Kapuas sudah berjalan dengan baik tetapi masih belum optimal yang tampak dari lemahnya lobi yang merupakan bentuk komunikasi politik yang paling dominan. Hal tersebut dikarenakan kurang intensifnya lobi dan pendekatan yang dilakukan serta keterampilan untuk melakukan lobi politik yang masih kurang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah terutama dalam proses penyusunan RAPBD agar komunikasi politik berjalan lancar dan mengutamakan kepentingan bersama.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, segenap pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Arriane, Lely. 2010. *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Cangara, Hafied. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Cresswell, Jhon W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Kothari, C.R. 2004. *Research Methodology Methods and Techniques, Second Revised Edition*. New Delhi: New Age International (P) Ltd.

Laswell, Harold. 1948. *The Structure and Function of Communication in Society*. New York: The Institute for Religious and Social Studies.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Walidjo. 2020. *Teknik Observasi Kapita Selekta Metodologi Penelitian*.

Prabowo, Vicky Andrian Dwi. 2017. *Komunikasi Politik Antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (Rapbd-P) Tahun 2015*. Jurnal FISIP Universitas Riau Vol. 4 No. 1

Wance, Marno. 2017. *Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif pada Penyusunan Legislasi Daerah*. Journal of Governance and Public Policy Vol. 4 No. 1

